BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, daerah pedesaan merupakan tempat utama penduduk bermukim dan menjalankan bisnis. Biasanya, daerah ini terdiri dari campuran lingkungan pemukiman, ladang atau sawah, dan kebun yang terhubung dengan bangunan dan fasilitas lainnya. Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sekelompok keluarga dan memiliki struktur pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa (Rusyan, 2022). Desa mencerminkan unit sosial terkecil yang telah berkembang dari masa ke masa bersama masyarakatnya, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia (Lenggono, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Kementerian Desa, Indonesia saat ini terbagi menjadi 38 provinsi, 514 kabupaten, 7.281 kecamatan, dan 83.971 desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang menyisihkan Dana Desa dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengatur perencanaan wilayah desa. Pelaksanaan inisiatif pemerintahan dan pembangunan di desa sangat terbantu dengan dana ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama menyusun rancangan APBDes yang memuat proyeksi pendapatan dan belanja desa untuk tahun mendatang. Rancangan APBDes selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang didasarkan pada arahan Bupati. Tujuan utama penyusunan APBDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pembangunan desa (B. Sunarso, 2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Peraturan ini disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 memberikan gambaran teknis tentang tata kelola keuangan desa. Berdasarkan

Pasal 1 ayat (6) bagian ketentuan umum, proses pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan krusial, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut tercakup dalam siklus anggaran tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memegang peranan yang strategis dalam mewujudkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dimulai dari proses penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban anggaran tahunan, seluruh tahapan berkontribusi secara langsung terhadap praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Kurniasari et al., 2024). Ketika warga desa memiliki pemahaman yang memadai dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya, pembangunan yang dirancang akan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi pengelolaan anggaran desa menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini tidak hanya mendorong keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya, serta memperkuat kelembagaan negara agar lebih berdaya guna dan tanggap (Mardiasmo, 2023).

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa Batu Putih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan utama pembangunan selama delapan tahun ke depan. Dokumen RPJMDes disusun setelah kepala desa terpilih resmi dilantik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang pelaksanaannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 39. Sebagai kelanjutan dari RPJMDes, pemerintah desa juga merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai pedoman pembangunan tahunan yang memuat target pendapatan dan belanja desa dalam satu tahun anggaran. Tahapan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara perencanaan jangka panjang dan

jangka pendek. Setelah RKPDes selesai disusun, Sekretaris Desa bertugas menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes, yang selanjutnya dibahas bersama dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut ini disajikan data APBDes Desa Batu Putih dalam tiga tahun terakhir sebagai gambaran pelaksanaan perencanaan tersebut.

Tabel 1. 1
APBDes Desa Batu Putih Tiga Tahun Terakhir

No	Keterangan	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Pendapatan Desa	Rp 1.748.235.000	Rp 1.668.377.000	Rp 1.668.377.000
2.	Belanja Desa	Rp 1.504.476.948	Rp 1.668.377.000	Rp 1.668.377.000

(Sumber : Sekertaris Desa Batu Putih)

Pada dua tahun terakhir, yang angkanya sama, pada tabel sebelumnya terlihat bahwa pendapatan dan pengeluaran Desa Batu Putih bervariasi dari tahun ke tahun. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber, termasuk uang transfer, Pendapatan Asli Desa (PAD), dan sumber pendapatan lain yang dapat diterima. Perbedaan jumlah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi biasanya menjadi alasan terjadinya variasi nilai pendapatan setiap tahun. Begitu pula dengan belanja desa, yang sifatnya wajib dan dimodifikasi berdasarkan rencana tahunan.

Belanja desa merupakan salah satu cara untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, dan nilainya bervariasi berdasarkan pendapatan yang diperoleh dan hasil RKPDes yang telah disusun oleh dewan desa. Penerapan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan sangat penting dalam situasi ini bagi pemerintah desa (Hurriyaturrohman et al., 2021). Pengelolaan sejumlah besar uang, khususnya Dana Desa, yang merupakan bagian signifikan dari pendapatan transfer, harus mematuhi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak hanya mematuhi persyaratan hukum tetapi juga memenangkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah federal,

penggunaannya diatur secara ketat melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan utama desa dan pengelolaannya merupakan komponen penting dari keseluruhan struktur keuangan desa. Struktur pengelolaan yang mengutamakan konsep tata kelola yang baik akan mengatur dan mengelola keuangan desa. Padahal, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, dan sesuai dengan kaidah pengendalian anggaran dan tertib administrasi (Mudhofar, 2022). Hal ini penting karena keterbukaan dan akuntabilitas harus dijaga secara menyeluruh dalam seluruh proses pengelolaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain menaati peraturan perundang-undangan, pengelolaan Dana Desa juga memiliki kewajiban moral kepada masyarakat sebagai penerima manfaat (S. Sunarso, 2023).

Menurut Undang-Undang tentang Kemasyarakatan, dana desa merupakan penyaluran dana khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga, serta berbagai aspek tata kelola desa lainnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan Dana Desa, mulai dari pelaporan keuangan, penganggaran, hingga penyalurannya.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga menegaskan batasan teknis terkait tata kelola keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Dana Desa dicairkan secara berkala oleh pemerintah pusat setiap tahun untuk mendukung berbagai layanan publik dan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran secara cermat sangat penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana tersebut (Ismawaty, 2023).

Berikut ini informasi mengenai Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat selama empat tahun terakhir sebagai dasar penilaian dan pertimbangan.

Tabel 1. 2
Anggaran Dana Desa 4 Tahun Terakhir

Tahun	Anggaran
2021	Rp.72.000.000.000.000
2022	Rp.68.000.000.000.000
2023	Rp.70.000.000.000.000
2024	Rp.71.000.000.000.000

(Sumber : <https://djpb.kemenkeu.go.id>)

Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi Dana Desa mengalami penurunan pada tahun 2022. Namun, anggaran kembali menunjukkan tren kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2023 dan 2024. Mengingat desa merupakan salah satu lokasi yang paling terdampak antara tahun 2020 dan 2021, pemotongan dana tahun 2022 merupakan bagian dari kebijakan nasional yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Untuk menjaga ketahanan ekonomi secara keseluruhan dalam skenario ini, pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran. Merujuk pada Bab II Pedoman Umum dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes RI) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan dana pada tahun tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang juga sesuai dengan kewenangan desa, penanggulangan dan penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa) di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran anggaran Dana Desa dipengaruhi oleh kondisi kebijakan nasional, situasi darurat terkini, dan jumlah dana yang tersedia.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa setiap tahunnya, yang selanjutnya dicairkan secara bertahap melalui mekanisme keuangan negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyalurkan dana kepada pemerintah daerah setelah diawali dengan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang dikelola oleh

Bendahara Umum Negara. Setelah diterima oleh pemerintah daerah, dana tersebut ditransfer ke masing-masing desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai bagian dari penyaluran dana nasional pada Tahun Anggaran 2024, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp5.454.815.000,00 kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dana tersebut disalurkan melalui RKUN. Setelah itu, dana tersebut secara bertahap diberikan kepada setiap dusun di setiap kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Sarolangun. Tujuan dari rencana penyaluran bertahap ini adalah untuk memastikan bahwa setiap desa dapat mengelola dan menggunakan Dana Desa secara efektif sesuai dengan rencana dan persyaratan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya (Bawono, 2019).

Tabel 1. 3
Dana Desa Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Sarolangun

No	Kecamatan	Alokasi Dasar (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa per Desa (Rp)
1	Batang Asai	365.552.570	13.896.208.000
2	Limun	254.297.440	8.322.863.000
3	Sarolangun	158.935.900	5.454.815.000
4	Pauh	206.616.670	6.542.043.000
5	Pelawan	222.510.260	8.481.346.000
6	Mandiingin	286.084.620	9.010.847.000
7	Air Hitam	143.042.310	5.623.643.000
8	Batin VIII	222.510.260	7.383.116.000
9	Singkut	190.723.080	7.976.671.000
10	Cerminan Gadang	158.935.900	5.021.705.000
11	Mandiingin Timur	158.935.900	5.557.844.000
Jumlah		2.368.144.910	82.481.047.000

(Sumber : Lampiran 1 Perbup Sarolangun No 3 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah)

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan yang membawahi 149 desa dan kelurahan. Pagu alokasi Dana Desa di Kecamatan Batang Asai merupakan yang tertinggi dari seluruh kecamatan

tersebut, yakni sebesar Rp13.896.208.000. Sedangkan Kecamatan dengan nilai alokasi terendah, yakni Kecamatan Cerminan Gedang, hanya sebesar Rp5.021.705.000. Metode perhitungan resmi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur variabel perhitungan seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kondisi geografis menjadi dasar perbedaan tersebut, yang bukan tanpa alasan.

Wilayah selatan Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Pelawan, merupakan salah satu daerah yang juga memperoleh alokasi Dana Desa yang cukup besar. Kecamatan ini menerima Dana Desa sebesar Rp8.481.346.000 untuk tahun anggaran 2024, yang disalurkan ke desa-desa sekitar melalui anggaran kabupaten. Dedikasi pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan lokal ditunjukkan dalam gambar ini. Distribusi dana untuk setiap dusun dalam batas wilayah Kecamatan Pelawan dirinci sebagai berikut.

Tabel 1. 4
Pagu Alokasi Dana Desa Kecamatan Pelawan Tahun Anggaran 2024

No	Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa Per Desa (Rp)
1	Penegah	15.893.590	529.615.000
2	Pelawan	15.893.590	543.803.000
3	Pulau Aro	15.893.590	493.389.000
4	Bukit	15.893.590	602.589.000
5	Lubuk Sepuh	15.893.590	679.407.000
6	Rantau Tenang	15.893.590	443.920.000
7	Muara Danau	15.893.590	470.298.000
8	Sungai Merah	15.893.590	785.494.000
9	Pematang Kolim	15.893.590	772.431.000
10	Batu Putih	15.893.590	652.668.000
11	Mekar Sari	15.893.590	658.064.000
12	Pasar Pelawan	15.893.590	690.112.000
13	Pelawan Jaya	15.893.590	633.200.000
14	Lubuk Sayak	15.893.590	521.358.000
Jumlah		222.510.260	8.481.346.000

(Sumber : Lampiran 1 Perbup Sarolangun No 3 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah)

Dengan total alokasi sebesar Rp652.668.000 untuk tahun anggaran 2024, Desa Batu Putih tercatat sebagai penerima Dana Desa terbesar keenam di Kabupaten Pelawan, berdasarkan statistik pada tabel di atas. Jumlah ini hanya sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan lima desa lainnya Desa Sungai Merah, Pematang Kolim, Pasar Pelawan, Lubuk Sepuh, dan Mekar Sari yang menerima lebih banyak dana. Secara geografis, Desa Batu Putih terletak di bagian selatan Kabupaten Sarolangun dan merupakan bagian dari Kabupaten Pelawan, yang merupakan daerah pedesaan yang terkenal dengan pembangunannya yang pesat.

Pagu Dana Desa Batu Putih telah dinaikkan, yang menunjukkan fokus khusus pada kebutuhan dan potensi pembangunan masyarakat. Tren alokasi dana yang diterima dusun ini telah meningkat setiap tahun selama empat tahun terakhir. Namun, nilai alokasi tersebut tetap konstan pada jumlah yang sama selama dua tahun terakhir, 2023 dan 2024. Hal ini dapat tercermin dari stabilitas kebutuhan anggaran atau pertimbangan kebijakan fiskal yang telah mempertimbangkan sejumlah indikator desa secara kolektif. Diharapkan dengan memanfaatkan alokasi yang stabil ini, kesejahteraan masyarakat Desa Batu Putih dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan.

Tabel 1. 5
Dana Desa (DD) Desa Batu Putih 4 Tahun Terakhir

Tahun	Alokasi Dasar (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
2021	15.100.671	530.219.000
2022	16.572.081	691.984.000
2023	15.893.590	652.668.000
2024	15.893.590	652.668.000

(Sumber : Spanduk Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kantor Desa Batu Putih)

APBDes Desa Batu Putih yang merupakan gabungan dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa yang dihitung setiap tahunnya berdasarkan Peraturan Bupati, termasuk di dalamnya adalah dana desa. Belanja desa merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pendapatan desa merupakan semua penerimaan yang sah yang masuk ke rekening kas desa tanpa harus dikembalikan.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi acuan dalam APBDes Tahun 2024. Pengelolaan keuangan desa harus bersifat terbuka, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan secara sistematis dengan berpedoman pada anggaran yang ketat, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1.

Kewajiban penerima amanah untuk melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajibannya kepada pemberi amanah disebut akuntabilitas. Penyediaan informasi yang cukup dan dapat dipercaya merupakan sarana utama untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Ikhsanto & Rahmawati, 2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjabarkan sejumlah indikator transparansi yang harus diikuti oleh pemerintah desa dalam situasi ini. Indikator-indikator tersebut antara lain: (1) mengkomunikasikan kebijakan anggaran desa kepada warga melalui berbagai saluran informasi; (2) memaparkan secara terbuka pelaksanaan program dan kegiatan desa; (3) memberikan akses kepada masyarakat terhadap dokumen anggaran desa; dan (4) membantu masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan tujuan terkait isu-isu lokal. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata penerapan konsep keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam menjaga integritas pemerintahan desa agar terhindar dari praktik-praktik curang seperti korupsi, suap, dan pencucian uang. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, pengelolaan keuangan desa menjadi rentan disalahgunakan. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Sarolangun yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan Dana Desa. Misalnya pada tanggal 9 Oktober 2023, Kejaksaan Negeri Sarolangun menetapkan mantan Kepala Desa Bernai sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan penghapusan aset desa (www.ganatra.com). Tak hanya itu, Kepala Desa Tambak Ratu, Kecamatan Batang Asai, dan bendahara desa dilaporkan DPD atas dugaan penggelembungan dana pembangunan gedung olahraga tahun 2023–2024 senilai Rp1 miliar, serta didakwa melakukan pemalsuan baliho APBDes (faktabungo.com). Bahkan pada 13 Agustus 2024, Kepala Desa Baru di

Kecamatan Air Hitam juga dilaporkan oleh anggota DPD Desa Baru ke kejaksaan atas dugaan penyelewengan Dana Desa, mulai dari anggaran fiktif hingga praktik pungli Bantuan Sosial dan penggelembungan proyek (www.news.com). Rangkaian kejadian ini mencerminkan bahwa tanpa adanya sistem kontrol dan akuntabilitas yang kuat, potensi penyalahgunaan dana publik di tingkat desa akan terus terjadi.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama yang diamanatkan oleh peraturan, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menjadi pedoman penting bagi aparatur desa. Berbagai penelitian kuantitatif terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan positif antara akuntabilitas dan transparansi dengan kualitas pengelolaan APBDes. Pada penelitian Ajeng Diah Utami (2022) membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Jambawangi, Bayuwangi (nilai $F_{hitung} = 15,219 > F_{tabel} = 3,15$). Hasil serupa juga diperoleh Ika Wulandari (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai t_{hitung} sebesar $6,732 > t_{tabel} 2,001$, dan Nur Laylatul Fitriyah (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Desa Sukamaju sebagai upaya mendorong tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi di masing-masing desa menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Terdapat desa yang telah menerapkan prinsip tersebut dengan baik, namun mayoritas masih menghadapi tantangan terutama dalam hal akuntabilitas kepada masyarakat dan keterbukaan informasi terkait kegiatan dan penggunaan anggaran. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dalam hal ini sebagian besar desa belum sepenuhnya terbuka dan bertanggung

jawab kepada publik atas segala kegiatan keuangan yang dilakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada konteks lokal yaitu Desa Batu Putih. Peneliti akan meneliti sejauh mana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa, sekaligus melihat bagaimana persepsi masyarakat dan mekanisme penyampaian informasi publik berperan dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang baik.

Maka dari itu, penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun”**, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi oleh akuntabilitas pemerintah Desa Batu Putih?
2. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi oleh transparansi pemerintah Batu?
3. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi pemerintah Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat akuntabilitas Desa Batu Putih dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Mengetahui tingkat transparansi pemerintah Desa Batu Putih dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Mengungkap faktor-faktor yang mempermudah dan menghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Batu Putih.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Konseptual

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik serta memberikan referensi dan wawasan tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Ilmiah

Mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang berminat dalam tata kelola keuangan desa, khususnya dalam bidang akuntabilitas dan transparansi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk mengembangkan karya ilmiah yang relevan di masa mendatang.

3. Praktis

Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa Batu Putih dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan rekomendasi penelitian ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes.